

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Kejari Garut Bentuk Tim Satgasus  
Entitas / Cakupan : Kabupaten Garut  
Sumber / Hal : Galamedia / Hal.9  
Edisi : Jum'at, 25 Mei 2018

## Dugaan Pungli di PUPR

### Kejari Garut Bentuk Tim Satgasus

#### GARUT, (GM).-

Terkait adanya dugaan pungutan liar (pungli) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut, akan membentuk satuan tugas khusus (satgasus) tindak pidana korupsi untuk menyelidiki kasus tersebut. Dalam kaitan rencana penggunaan dana Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat Tahun 2018 tersebut, diduga ada praktik pungli oleh oknum di Dinas PUPR terhadap pengusaha jasa konstruksi.

"Ya, kami akan membentuk tim satgasus untuk diterjunkan menelusuri kebenaran adanya dugaan pungutan liar tersebut," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Azwar, S.H.,

Kamis (24/5) melalui ponselnya.

Dikatakan Azwar, nantinya tim satgasus akan bekerja mengumpulkan data terkait adanya dugaan pungli tersebut. "Nanti di informasikan secara rinci hasil kerja tim," katanya.

Ia menuturkan, praktik pungli yang dilakukan oknum pejabat Dinas PUPR, sudah diduganya sebelum kasus tersebut ramai dibicarakan di kalangan masyarakat.

"Kami sudah mengendusny, tinggal menunggu waktu saja kapan tim bergerak," tandasnya.

Azwar mengimbau seluruh pengusaha jasa konstruksi di Kabupaten Garut agar tidak menuruti permintaan dana sebagai bentuk komitmen. Soalnya, selain akan merugikan pada

saat pelaksanaan pekerjaan, pemberi juga bisa kena pidana.

#### Segera bekerja

Sementara itu, Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Yuda Ferdinal, mendukung penuh upaya Kejaksaan Negeri Garut dalam mengusut kasus dugaan pungli tersebut dengan membentuk tim satgasus. Tim lanjutnya, diharapkan bisa mengungkap dugaan pungli terhadap pengusaha jasa konstruksi oleh oknum di lingkungan Dinas PUPR tersebut, secara transparan.

"Kami akan menunggu sejauh mana Tim Satgasus Kejaksaan Negeri bekerja dalam mengungkap kasus dugaan pungli tersebut," ujarnya.

Yuda juga mendesak agar tim satgasus untuk segera bekerja. Ditegaskan dia, pihaknya ingin mengingatkan jangan sampai tim tersebut "kalah" oleh intervensi kekuasaan yang menurutnya kemungkinan terjadi dalam mengungkap kasus tersebut.

"Karena itu, kami akan mengawal tim tersebut sampai tuntas," katanya.

Diberitakan sebelumnya, pengusaha jasa konstruksi Garut resah karena adanya dugaan permintaan (pungutan) sebesar 3 persen oleh oknum pejabat Dinas PUPR Garut. Pungutan yang dinilai liar (pungli, red) tersebut, dikatakan sebagai bentuk komitmen pada program Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

(rob)\*\*



ROBI TAUFIK AKBAR

KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Garut, akan membentuk satuan tugas khusus (satgasus) tindak pidana korupsi.